

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang maju dicerminkan oleh salah satu sarana, yaitu melalui pendidikan. Jika dikomparasikan dengan beberapa negara di Asia dan negara Eropa, sejarah menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia sejak zaman dahulu Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini sesuai menurut pendapat Abdullah dalam Sudarto et al. (2021) yang mana beliau berpendapat bahwa tidak ada perkembangan yang berarti terkait dengan perjalanan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama dalam visi dan misi global.

Perubahan proses pendidikan dapat menjadi suatu kebiasaan dari setiap zaman karena dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang kreatif serta inovatif dalam menghadapi perkembangan zaman. Sistem pendidikan sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman. Sistem pendidikan harus mampu menghasilkan peserta didik yang dapat bersaing di era digital atau era industri 4.0. Akibatnya, pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan karakter peserta didik serta kecerdasan intelektual mereka.

Kebijakan pemerintah yang telah diterapkan dalam dunia pendidikan sebenarnya sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah di bidang pendidikan dengan menyediakan anggaran sebesar 20% dalam rangka pengadaan beapeserta didik bagi peserta didik yang kurang mampu dan program wajib belajar. Namun, dapat dilihat bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia sistemnya belum terarah secara jelas dan tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain.

Seperti yang sudah diketahui bahwa sejak awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi covid-19, mengharuskan kami untuk melakukan kegiatan

belajar mengajar secara daring di antara kegiatan lainnya. Alhasil, Nadiem Makarim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengusulkan perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Beliau mencoba untuk memahami dan mengubah perspektif pendidikan di Indonesia. Ini adalah kemajuan baru dalam proses pembelajaran jarak jauh yang dapat memberikan pengalaman belajar tanpa harus memenuhi persyaratan kelulusan dan penyelesaian. Perubahan yang diusulkan tersebut adalah gerakan “Merdeka Belajar.” Program ini dikatakan direncanakan secara sistematis karena kurikulum harus dapat membantu peserta didik berhasil dan memainkan peran yang sangat penting bagi setiap peserta didik.

Dalam usulan tersebut, terdapat empat kebijakan yang diusulkan, pertama adalah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang diganti menjadi ujian (asesmen), kedua, Ujian Nasional (UN) diganti dengan Assessment Kompetensi Minimum (AKM), dan Survey Karakter (SK), ketiga mempersingkat RPP, dan keempat fleksibilitas sistem Zonasi PPDB. Usulan dari Mendikbud ini mengikuti trend progresivisme dalam pendidikan, dimana sekolah ini menentang sistem pendidikan otoriter masa lalu dan bertujuan untuk dapat mengubah pola dalam pendidikan yang telah lama diterapkan, yang mana pola tersebut hanya berfokus pada penguasaan materi sehingga membuat peserta didik kesulitan untuk berpikir kritis maupun inovatif.

Selain itu, Merdeka Belajar memiliki tujuan agar guru maupun murid bebas untuk berinovasi, sehingga dapat menjadi pribadi yang kreatif karena memiliki kebebasan dengan cara belajar dengan mandiri. Dengan demikian sangat jelas bahwa Kurikulum Merdeka ditujukan untuk membantu mempersiapkan peserta didik masa depan untuk menjadi individu yang memiliki keahlian, keterampilan, penalaran tinggi, dan berpikir kreatif dan kritis yang dapat digunakan dalam masyarakat di masa depan. Guru dan

peserta didik dapat berkolaborasi untuk menemukan kebenaran sistem pembelajaran dalam konsep belajar mandiri. Hal tersebut semakin menguatkan peranan guru di dalam kelas bukan untuk menyamakan kebenaran dan peserta didik tidak menggunakan guru sebagai sumber kebenaran, melainkan sebagai subjek untuk menggali kebenaran dan kekuatan berpikir logis serta kemampuan berikir kritis peserta didik dalam memandang dunia beserta berbagai kejadian yang terjadi.

Dengan berkembangnya teknologi digital dan penggunaan internet di era saat ini, program merdeka belajar dapat dijadikan sebagai suatu peluang atau kesempatan dalam merubah sistem pendidikan yang kaku, seperti pembaruan peringanan sistem kerja guru yang berfokus pada hal administratif, dan kebebasan untuk berinovasi bagi peserta didik maupun unit pendidikan seperti guru.

Empat gagasan yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan kebebasan maupun kenyamanan yang cukup kepada setiap peserta didik, guru, dan sekolah untuk tujuan penetapan kebijakan. Hal ini diantisipasi sebagai respon terhadap tuntutan saat ini dan mendorong lembaga pendidikan untuk selalu beradaptasi dan responsif terhadap kurikulum. Sebab, menurut Ki Hadjar Dewantara, peserta didik paling betah bermain game di sekolah. Namun, apabila peserta didik telah merasa nyaman ketika di sekolah akan berdampak positif yakni akan lebih mudah memahami dan menyerap materi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru, kemudahan ini berdampak signifikan pada proses pembelajaran.

Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pembelajaran mandiri dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pembelajaran geografi. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka akan menghasilkan sejumlah perubahan pada sistem pembelajaran. Sebelumnya, perubahan ini hanya dapat dilakukan secara internal, namun kini dapat dilakukan senyaman

mungkin untuk memudahkan guru dan peserta didik berkomunikasi satu sama lain. Sistem pembelajaran untuk program pembelajaran mandiri kemudian dirancang untuk membentuk kepribadian peserta didik dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan tanpa memaksakan nilai-nilai dasar atau tujuan yang tinggi pada mereka. Akan tetapi, pengimplementasian program kurikulum ini memerlukan banyak proses, waktu, maupun kesiapan bagi para peserta didik maupun guru, akibatnya akan menimbulkan banyak pro dan kontra sehingga akan tidak mudah dalam proses pelaksanaannya karena akan menyebabkan *culture shock* saat beberapa sistem berubah, baik bagi para guru maupun peserta didik itu sendiri dan dapat mempengaruhi prestasi belajar mereka.

Hal ini sejalan dengan sumber yang dikutip, seperti kajian Wardani (2022) berjudul “Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Perspektif Teori Konstruktivisme di Universitas Muhammadiyah Malang.” Kajian ini menemukan bahwa mekanisme kerjasama dengan pihak eksternal masih banyak menemui kendala antara lain evaluasi yang belum tuntas, proses penyesuaian kurikulum KKNi dengan program MBKM yang akan berdampak pada mahasiswa dan dosen, kesulitan teknis dalam pelaksanaan program MBKM, dan pemagangan program.

Kedua, Kajian Sinomi (2022) berjudul “Persiapan Guru Dalam Melaksanakan Sistem Pembelajaran Merdeka Belajar di SDN 01 Muara Pinang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.”. Salah satu faktor yang menghambat guru dalam menerapkan sistem pembelajaran mandiri adalah nyaman dengan standar namun masih berkebutakan dengan teknologi, demikian temuan studi tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya kualitas SDM guru, kurangnya fasilitas dan sumber belajar, atau infrastruktur yang kurang memadai, tua, dan tanpa pengalaman belajar mandiri sebelumnya.

Ketiga, Hasnawati (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pola Pelaksanaan Pembelajaran Mandiri Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kreativitas Peserta didik di SMAN 4 Wajo Kabupaten Wajo”. Kreativitas peserta didik dipengaruhi secara positif dengan penggunaan pembelajaran pembedaan dan penilaian sebagai metode penerapan pola Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 4 Wajo, demikian temuan penelitian. Selain itu, menjadikan pembelajaran Agama Islam Pendidikan lebih menyenangkan, kualitas dan signifikansi, sebagai peserta didik yang menggunakan belajar mandiri memperoleh keterampilan berpikir kritis, kepekaan emosional, bakat, dan imajinasi yang hidup.

“Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Bahasa Prancis Kelas XI IPS 3 (Studi Deskriptif-Kualitatif di SMA Ksatria 51 – Jakarta)” menjadi judul penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Luluk Akasahutami. Kajian tersebut mengungkapkan, meski belum sempurna, Kurikulum 2013 telah diterapkan. Hanya 54% komponen pembelajaran yang tercantum dalam RPP yang dipenuhi oleh perencanaan pembelajaran bahasa Prancis guru. Metode saintifik juga mengidentifikasi beberapa tahapan proses pembelajaran Kurikulum 2013 yang tidak dilakukan oleh guru sesuai dengan RPP yang telah disusun. Selain itu, baik buku teks maupun bahan ajar tidak digunakan selama proses pembelajaran.

Beberapa penelitian diatas sesuai dengan pernyataan bahwa perubahan kurikulum akan memerlukan banyak proses, waktu, maupun kesiapan bagi para peserta didik maupun guru sehingga akan tidak mudah dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan sebelumnya, sistem pembelajaran Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan baru yang tentunya harus menghadapi kesulitan dalam penerapannya. Oleh sebab itu, penelitian

ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kurikulum Merdeka yang digunakan di SMA Muhammadiyah 11 Jakarta dan mendapatkan informasi tentangnya sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana kurikulum mandiri itu digunakan.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kondisi implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran geografi di kelas X, SMA Muhammadiyah 11 Jakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran geografi di kelas X, SMA Muhammadiyah 11 Jakarta?

C. Fokus Penelitian

Implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran geografi serta faktor pendukung dan penghambatnya di SMA Muhammadiyah 11 Jakarta.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran geografi di kelas X, SMA Muhammadiyah 11 Jakarta.
2. Menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran geografi di kelas X, SMA Muhammadiyah 11 Jakarta.

b. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya pembelajaran geografi di sekolah, khususnya di kelas X, SMA Muhammadiyah 11 Jakarta.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di kelas X, SMA Muhammadiyah 11 Jakarta dan mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapinya.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

a. Hakikat Implementasi

Sangat penting untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari setiap hari dalam kehidupan manusia. Untuk bertahan hidup manusia harus bergantung satu sama lain, sebab itulah manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Secara alami, kelangsungan hidup ini membutuhkan bekal untuk sosialisasi di masyarakat. Penerapan dan pengamalan dalam bentuk perkataan, perbuatan, sikap, dan budi pekerti sangat diperlukan. Istilah "implementasi" dapat digunakan untuk menggambarkan kegiatan implementasi ini. KBBI mendefinisikan implementasi sebagai "penerapan" dan "pelaksanaan". Setiawan (2004) menyatakan Implementasi merupakan perluasan kegiatan yang menyesuaikan satu sama lain dan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif diperlukan untuk mencapai hal ini. Sebaliknya, Fullan dalam Majid (2014) menginterpretasikan implementasi menjadi proses penerapan ide, program, dan kegiatan baru ke dalam praktik, yang memungkinkan individu lain mencapai atau memprediksi perubahan..

Oleh karena itu, implementasi dapat dipahami sebagai proses mempraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari terkait segala hal yang telah dipelajari. Konsep yang ideal diperlukan sebelum proses implementasi untuk memastikan bahwa ada hasil yang sesuai dengan harapan pencipta kegiatan terhadap implementasi yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, agar pelaksanaannya dapat bertahan lama, maka harus direncanakan dengan baik sejak dini. Tidak hanya mengambil tindakan tetapi juga perencanaan dan persiapan yang cermat diperlukan untuk implementasi. Akibatnya, jelas bahwa untuk mencapai hasil yang diinginkan, implementasi harus diatur oleh mekanisme. Secara alami, sebuah konsep diperlukan untuk mencapai tujuan implementasi. Menurut KBBI, konsep adalah rancangan, huruf kabur, dsb. Dapat disimpulkan bahwa konsep adalah rancangan atau konsep yang dibuat untuk mewujudkan rencana ideal yang dapat dilaksanakan dalam rentang waktu yang lama. Sebelum memulai implementasi, langkah krusial yang harus diambil adalah perancangan atau pemetaan yang menyeluruh, dengan memperhitungkan segala potensi hasil, termasuk dampak positif maupun negatif.

b. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan aktual dari rencana yang disiapkan sebagai tindakan. Evaluasi sangat bergantung pada implementasi. Mengikuti keluarnya arahan hukum dari suatu kebijakan, maka implementasi kebijakan adalah proses pengelolaan input untuk menghasilkan outcome atau output bagi masyarakat. Wakia, dalam Wardani (2022). Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang terutama memerlukan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya tanpa mengorbankan hal lain. Untuk mencapai tujuan dan dampak yang telah ditetapkan, program kebijakan harus diwujudkan. Dalam rangka menciptakan terwujudnya sasaran atau tujuan kebijakan sebagai hasil kegiatan pemerintah yang sangat potensial, maka implementasi berfungsi sebagai upaya. Dalam Wardani, (2022), implementasi kebijakan dibahas sesuai dengan teori Edward:

1. Pembuat kebijakan berupaya menyampaikan informasi kepada

pelaksana melalui komunikasi.

2. Sumber daya meliputi fasilitas yang diperlukan dan sumber daya manusia yang memadai.
3. Disposisi berkaitan dengan komitmen pelaksana kebijakan atau program.
4. Standar Operasional Prosedur yang mengatur pelaksanaan suatu kebijakan menjadi landasan struktur birokrasi.

2. Kurikulum

a. Hakikat Kurikulum

Dalam bidang pendidikan, salah satu istilah “kurikulum” telah digunakan sejak lama. Istilah "kurikulum" didefinisikan dalam kamus Webster pada tahun 1955 sebagai "sesuatu yang khusus digunakan dalam pendidikan dan pengajaran," khususnya sebagai sejumlah mata pelajaran atau kursus yang diperlukan untuk lulus dari perguruan tinggi. Selain itu, seluruh pelajaran lembaga pendidikan disebut sebagai kurikulum.

Menurut Ruhimat (2017), istilah “kurikulum” berasal dari kata “pelari” dan “curre” yang berarti “tempat balap”. Kurikulum pertama kali digunakan dalam dunia olahraga untuk merujuk pada jarak yang harus ditempuh seorang pelari untuk memenangkan medali atau penghargaan. Kemudian, dalam bidang pendidikan, ilmu ini diterapkan pada sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan peserta didik untuk mendapatkan ijazah.

Berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya, kurikulum pada dasarnya terdiri dari dua hal yaitu ada mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik, dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ijazah. Akibatnya, praktik mengajar menyiratkan bahwa setiap peserta didik harus menguasai semua mata pelajaran yang ditugaskan,

menempatkan instruktur dalam posisi yang sangat berpengaruh dan mengendalikan.

Kurikulum terus mengalami perkembangan, kini tidak lagi berkisar pada jumlah mata pelajaran yang akan diajarkan, melainkan cakupan yang lebih luas. Secara umum, istilah “kurikulum” tidak hanya mencakup sejumlah mata pelajaran tetapi juga semua kesempatan belajar yang dimiliki peserta didik dan yang berpengaruh pada perkembangan pribadinya. Bahkan Alberty dalam Ruhimat (2017) berpendapat bahwa kurikulum mencakup semua kegiatan yang disponsori sekolah. Sebagai akibatnya, kurikulum menggabungkan kegiatan kelas dan ekstrakurikuler untuk peserta didik.

Saylor, Alexander, dan Lewis dalam Ruhimat (2017), melihat kurikulum sebagai upaya sekolah untuk mendorong peserta didik belajar baik di dalam maupun di luar kelas.

Menurut Pasal 1 Ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”

Suryobroto dalam Akasahutami (2018) menjelaskan bahwa segala hal baik yang ada di dalam maupun di luar kelas dan masih berhubungan dengan pengalaman pendidikan sekolah dapat disebut sebagai kurikulum. Dengan kata lain, kurikulum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan pengalaman dan berkaitan dengan pendidikan baik di dalam maupun di luar kelas.

Menurut Print dalam Sanjaya (2008) mengungkapkan bahwa kurikulum meliputi:

1. Pengalaman yang direncanakan untuk pembelajaran.

2. Menyediakan program pendidikan dan kelembagaan.
3. Digambarkan sebagai dokumen nomor.
4. Pengalaman yang diperoleh melalui penerapan dokumen tersebut.

Oleh karena itu, atas dasar pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa suatu kaidah atau konsep dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terorganisasi yang meliputi tujuan, rancangan, isi, bahan pelajaran, dan mekanisme lain dimana kurikulum berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar, serta bagaimana mencapai tujuan pendidikan dan moral adalah definisi akhir dari kurikulum.

b. Fungsi Kurikulum

Kurikulum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman bagi para guru. Kurikulum dapat dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran oleh kepala sekolah dan pengawas. Kurikulum memberi orang tua seperangkat pedoman untuk diikuti. Kurikulum membantu orang tua mengajar anak-anak mereka untuk belajar di rumah untuk kepentingan masyarakat. Di sekolah, kurikulum memiliki fungsi sangat penting sebagai pedoman pelaksanaan proses pendidikan, selain itu juga berfungsi sebagai pedoman belajar bagi peserta didik.

Menurut Ruhimat (2017), jika dilihat dari fungsi kurikulum, ada enam fungsi bagi peserta didik yaitu:

1. Fungsi Penyesuaian

Sesuai dengan fungsi penyesuaiannya, kurikulum sebagai alat pengajaran harus dapat membantu peserta didik mengembangkan sifat penyesuaian diri dengan baik, seperti kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan fisiknya. Lingkungan itu sendiri bersifat dinamis dan terus berubah sehingga kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di lingkungan sangat diperlukan bagi peserta didik.

2. Fungsi Integrasi

Menciptakan individu yang utuh merupakan sebuah keharusan untuk kurikulum sebagai alat pendidikan agar dapat memenuhi fungsi integrasi. Karena peserta didik pada dasarnya adalah anggota masyarakat dan merupakan komponen penting darinya. Selain itu, untuk dapat hidup dan terintegrasi dengan masyarakat mereka harus mempunyai kepribadian yang diperlukan.

3. Fungsi Diferensiasi

Menurut fungsi diferensiasinya, kurikulum sebagai alat pengajaran harus mampu memenuhi kebutuhan unik setiap peserta didik. Setiap anak didik memiliki perbedaan fisik dan psikis yang harus dihormati dan dilayani secara wajar.

4. Fungsi Persiapan

Sesuai dengan fungsinya sebagai persiapan, kurikulum sebagai alat pengajaran harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, kurikulum diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik untuk berfungsi di masyarakat jika tidak dapat melanjutkan pendidikan.

5. Fungsi Pemilihan

Menurut fungsi pemilihan, kurikulum sebagai alat pengajaran harus memungkinkan peserta didik memilih program pembelajaran berdasarkan kemampuan dan minatnya. Fungsi seleksi ini berkaitan erat dengan fungsi diferensiasi karena pengenalan perbedaan individu peserta didik juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih berdasarkan minat dan kemampuannya. Kurikulum harus memiliki struktur yang luas dan dapat diadaptasi untuk memenuhi kedua fungsi tersebut.

6. Fungsi Diagnostik

Fungsi diagnostik mengandung arti bahwa kurikulum perlu dapat

membantu peserta didik memahami dan menerima kelebihan dan potensi dirinya sebagai alat pendidikan. Diharapkan peserta didik mampu mengembangkan potensi kekuatannya sendiri atau memperbaiki kelemahannya jika mampu memahami kelebihan dan kekurangannya.

c. Peranan Kurikulum

Untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan formal sekolah dan madrasah sangat menentukan. Jika dirinci lebih lanjut, tiga peran dianggap sangat penting: peran konservatif, peran kreatif, dan peran kritis atau evaluatif menurut Hamalik dalam Ruhimat (2017).

1. Peranan Konservatif

Peranan konservatif menyoroti bahwa kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mendidik generasi muda, dalam konteks ini para peserta didik, tentang nilai-nilai yang bersumber dari warisan budaya yang dianggap relevan saat ini.. Kurikulum pada dasarnya berpusat pada masa lalu di bawah peran konservatif ini. Mengingat bahwa pendidikan pada dasarnya adalah proses sosial, posisi ini bersifat fundamental.

2. Peranan Kreatif

Sains dan kemajuan lainnya terus berlangsung. Peran kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan. Potensi setiap peserta didik untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan cara berpikir baru yang akan membantunya dengan baik sepanjang hidupnya harus dimanfaatkan oleh kurikulum.

3. Peranan Kritis dan Evaluatif.

Posisi ini didasarkan pada pemahaman bahwa nilai dan budaya masyarakat terus mengalami evolusi. Terlebih lagi, perkembangan

yang berlangsung saat ini dan di masa depan belum tentu selaras dengan kebutuhan yang ada. Dalam konteks ini, kurikulum memiliki peranan penting dalam mengevaluasi dan memilih pengetahuan baru untuk diwariskan, sambil tetap mempertahankan atau mengadaptasi nilai dan budaya yang telah ada, atau menerapkan hasil perkembangan terbaru. Kurikulum juga harus aktif dalam melakukan kontrol atau penyaringan sosial, di mana nilai-nilai sosial yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini perlu dimodifikasi atau diperbaharui.

Tentu saja, agar situasi tersebut terpenuhi, Ketiga peran tersebut harus hidup berdampingan secara harmonis dan seimbang. Ketimpangan akan terjadi jika hal ini tidak dilakukan, membuat peran kurikulum sekolah menjadi kurang ideal. Guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, peserta didik, dan anggota masyarakat—seluruh entitas yang terlibat dalam proses pendidikan—bertanggung jawab untuk menyinkronkan tiga fungsi utama dari kurikulum. Akibatnya, semua pihak yang berpartisipasi harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan konten kurikulum yang bersangkutan dalam konteks pekerjaan mereka.

3. Kurikulum Merdeka

a. Hakikat Kurikulum Merdeka

Menurut Syukri dalam Sinomi (2022) Salah satu prakarsa yang dipelopori oleh Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bertujuan untuk menumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus suasana belajar yang menyenangkan. Alasan Kurikulum Merdeka adalah agar guru, peserta didik, dan wali dapat memiliki suasana ceria dalam pembelajaran. Kebebasan untuk memahami bahwa proses pendidikan harus menumbuhkan lingkungan

yang positif. Menurut Mendikbud, kebebasan belajar bertentangan dengan tujuan agar hasil pendidikan lebih berkualitas dan peserta didik tidak lagi hanya pandai menghafal informasi; sebaliknya, mereka harus memiliki pemahaman yang luas mengenai prosedur belajar guna tumbuh sebagai individu, serta keterampilan analitis yang tajam dan penalaran yang memadai. Menurut Fathan dalam Sinomi (2022) Versi Merdeka Belajar dari Mendikbud dapat diartikan bahwa guru harus mengembangkan pemikiran inovatif sekaligus memasukkan kurikulum ke dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan hal tersebut akan memotivasi peserta didik agar secara positif dapat merespons dalam pembelajaran.

Menurut Pusat Informasi Guru Kemdikbud (2022) Kurikulum Merdeka merupakan sebuah model kurikulum yang dirancang sebagai struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif. Model ini menekankan pada materi inti yang penting dan bertujuan untuk mendukung peserta didik dalam mengasah karakter serta kompetensi mereka.

Berikut ini adalah fitur utama dari kurikulum ini yang membantu peserta didik pulih dari pembelajaran:

1. Pembelajaran berbasis proyek untuk menumbuhkan karakter dan soft skill, sesuai dengan profil mahasiswa pancasila.
2. Agar memiliki cukup waktu untuk mempelajari keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi secara mendalam, berkonsentrasilah pada materi yang mutlak diperlukan.
3. Fleksibilitas bagi guru untuk mengadaptasi konten dan konteks lokal serta melakukan pengajaran yang berbeda berdasarkan kemampuan peserta didik.

Sementara itu, definisi BSNP (2020)/Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang

menggunakan pendekatan bakat dan minat. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran mana yang ingin mereka pelajari di sini berdasarkan kekuatan dan minat mereka.

b. Pengorganisasian Pelaksanaan Pembelajaran

Organisasi pembelajaran harus diperbarui untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Mengatur bagaimana pembagian kewenangan antara lembaga pendidikan dan pemerintah pusat merupakan salah satu pendekatan.

(1) Kewenangan Pemerintah Pusat

1. Struktur Kurikulum

Menurut Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Mengenai Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Dalam Konteks Pemulihan Pembelajaran, pembelajaran intrakurikuler diidentifikasi sebagai salah satu dari dua komponen utama dalam struktur kurikulum untuk SMA/MA.; Selain itu, proyek peningkatan profil mahasiswa Pancasila menerima sekitar 30% dari total JP setiap tahunnya. Dari segi isi dan waktu pelaksanaan, proyek peningkatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan secara fleksibel. Isi proyek profil harus membahas capaian profil pelajar Pancasila berdasarkan fase peserta didik, tetapi tidak perlu membahas capaian pembelajaran mata pelajaran. Proyek dapat diselesaikan dengan menjumlahkan alokasi jam pembelajaran proyek dari semua mata pelajaran dalam hal manajemen waktu pelaksanaan. Jumlah total waktu pelaksanaan untuk setiap proyek tidak harus sama.

2. Profil Pelajar Pancasila

Profil pelajar Pancasila menggambarkan pelajar Indonesia yang berkompeten, berwawasan global, dan bertindak sesuai dengan

nilai-nilai Pancasila yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat enam dimensi dan beberapa unsur dalam Profil Mahasiswa Pancasila, antara lain:

- a. Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia
Peserta didik menganut dan mengamalkan prinsip dan ajaran agama atau kepercayaannya. Akhlak yang baik terhadap diri sendiri, orang lain, alam, dan negara Indonesia (nasionalisme) adalah contohnya.
- b. Berkebinekaan Global
Pelajar Pancasila mampu menghormati dan berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya lain, mengenal dan mencintai budaya dan negara sendiri (nasionalisme), dan mengenal dan mencintai budaya sendiri. Untuk mendamaikan perbedaan budaya dan membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan inklusif, mereka juga merefleksikan pengalaman mereka dengan keberagaman.
- c. Mandiri
Pelajar Pancasila tahu siapa mereka dan apa yang harus mereka hadapi, dan mereka menggunakan pengaturan diri untuk menetapkan tujuan dan menjalani kehidupan yang lebih baik.
- d. Bergotong Royong
Pelajar Pancasila bekerja sama dengan cara yang dibangun di atas kemanusiaan dan kepedulian terhadap bangsa dan negara sehingga mereka dapat berbagi dengan orang lain.
- e. Bernalar Kritis
Pelajar Pancasila yang berpikir kritis menilai semua informasi dan gagasan yang dikumpulkan dengan baik. Selain itu, mereka

mampu mengevaluasi dan mempertimbangkan cara berpikir dan penalaran mereka sendiri.

f. Kreatif

Pelajar Pancasila yang kreatif mampu melahirkan konsep, karya, dan tindakan orisinal. Selain itu, mereka dapat berpikir kreatif dan dengan berbagai pilihan untuk memecahkan masalah.

3. Capaian Pembelajaran

Berdasarkan Pusat informasi guru kemdikbud (2022) capaian pembelajaran diawali dengan tahap Foundation PAUD, peserta didik dituntut untuk mencapai Capaian Pembelajaran (CP). Seperangkat kompetensi berformat naratif yang komprehensif dan ruang lingkup materi membentuk capaian pembelajaran. Narasi hasil belajar yang disusun secara komprehensif mencakup seperangkat kompetensi dan cakupan konten. Capaian pembelajaran terdiri dari enam fase (A–F) untuk pendidikan dasar dan menengah mencakup semua jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SDLB, SMPLB, SMALB, Paket A, Paket B, dan Paket C).

Capaian pembelajaran untuk tingkat SMA, khususnya untuk kelas X SMA/MA/Program Paket C terdapat pada tahap E. Capaian pembelajaran geografi tersebut dapat dilihat pada akhir tahap E: Dasar-dasar geografi, peta, penginderaan jauh, sistem informasi geografis (SIG), penelitian geografi, dan fenomena geosfer dapat dipahami oleh peserta didik. Mereka juga mampu menemukan dan menginvestigasi wilayah berdasarkan pemahaman mendasar tentang keragaman sosial dan fisik wilayah tersebut (lokasi, keunikan, persebaran, persamaan dan perbedaan, dll.). Peserta didik mampu mendeskripsikan isu-isu yang muncul dari fenomena geosfer dan

menawarkan saran cara yang paling efektif untuk mengatasinya. Hasil penelitian dapat dibagikan atau dipublikasikan oleh mahasiswa dengan berbagai cara.

4. Prinsip Pembelajaran Dan Asesmen

Dalam lingkungan belajar, pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik, guru, dan sumber belajar. Berdasarkan Pusat informasi guru kemdikbud (2022) prinsip pembelajaran Kurikulum Merdeka terdiri dari 5 aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik dipertimbangkan ketika merancang instruksi, kebutuhan belajar terpenuhi, dan karakteristik dan perkembangan peserta didik direfleksikan. Hasilnya, pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna.
- 2) Tujuan pembelajaran adalah untuk mendorong peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- 3) Pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik didukung oleh proses pembelajaran.
- 4) Pendidikan yang relevan, atau pendidikan yang disesuaikan dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik bekerjasama dengan orang tua dan masyarakat
- 5) Pembelajaran yang selalu mengarah tentang masa depan.

Proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik dikenal sebagai penilaian atau asesmen. Menurut Pusat informasi guru kemdikbud (2022) ide dasar di balik asesmen yakni:

- 1) Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan memberikan umpan balik komprehensif kepada guru, peserta didik, dan orang tua/wali untuk membantu mereka memilih strategi pembelajaran tambahan.
- 2) Penilaian dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, dan cara serta waktu pelaksanaannya dapat diubah untuk memastikan efektifitas pencapaian tujuan pembelajaran.
- 3) Penilaian dilakukan dengan cara yang adil, proporsional, valid, dan dapat diandalkan untuk menunjukkan seberapa baik seorang peserta didik belajar, untuk mengetahui langkah yang perlu dilakukan berikutnya dan untuk membantu membuat program masa depan untuk pembelajaran yang tepat.
- 4) Laporan kemajuan dan prestasi belajar peserta didik mudah dipahami dan memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan keterampilan yang dipelajari serta strategi untuk menindaklanjutinya.
- 5) Hasil penilaian dijadikan dasar refleksi oleh peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali untuk meningkatkan pembelajaran.

(2) Kewenangan Satuan Pendidikan

1. Visi, Misi, dan Tujuan sekolah

Visi, misi, dan tujuan sekolah dapat dimasukkan ke dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

2. Kebijakan Lokal Terkait Kurikulum

Kurikulum dan pembelajaran dapat dikembangkan dan dikelola oleh sekolah berdasarkan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.

3. Proses Pembelajaran dan Asesmen

Berdasarkan Pusat Informasi Guru Kemdikbud (2022), terdapat tiga jenis aktivitas pembelajaran dalam konsep Kurikulum Merdeka, yaitu:

- 1) Pembelajaran intrakurikuler dibedakan sehingga peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk menyelidiki dan meninjau berbagai konsep. Guru juga diberi keleluasaan untuk memilih alat pengajaran berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya.
- 2) Pembelajaran ko-kurikuler berupa proyek peningkatan Profil pelajar Pancasila, berdasarkan pemikiran bahwa pembelajaran interdisipliner harus fokus pada pertumbuhan karakter dan kompetensi umum.
- 3) Minat peserta didik dan sumber daya unit pengajaran menentukan bagaimana pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan.

Alokasi jam belajar struktur kurikulum ditulis sekaligus selama satu tahun. Selain itu, terdapat saran bagaimana pembagian jam belajar jika diberikan secara rutin atau mingguan. Berdasarkan Pusat informasi guru kemdikbud (2022) Siklus pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut:

1) Asesmen diagnostik

Untuk mengetahui potensi, karakteristik, kebutuhan, tahapan perkembangan, dan tahapan pencapaian belajar peserta didik, guru melakukan penilaian awal. Pada awal tahun pembelajaran tidak jarang dilakukan penilaian awal dengan maksud hasil penilaian tersebut sebagai bahan untuk membuat rencana metode pembelajaran selanjutnya.

2) Perencanaan

Hasil penilaian diagnostik digunakan oleh guru untuk mengatur proses pembelajaran dan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya.

3) Pembelajaran

Penilaian formatif akan diberikan secara berkala oleh guru untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dan, jika perlu, melakukan penyesuaian metode pengajaran. Sebagai metode evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, guru juga dapat melakukan penilaian sumatif pada akhir proses pembelajaran.

4. Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan

Menurut Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, satuan pendidikan mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional yang digunakan untuk pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah semuanya berperan dalam pengembangan kurikulum operasional.

5. Pengembangan Perangkat Ajar

Menurut Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, berbagai bahan ajar digunakan guru untuk mencapai profil peserta didik dan hasil belajar yang Pancasilais. Alat ajar antara lain buku teks, modul proyek peningkatan profil pelajar Pancasila, contoh Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, video pembelajaran,

dan bentuk lainnya. Ada berbagai sumber pengajaran yang tersedia untuk guru.

c. Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar

Terdapat empat inti kebijakan yang menjadi perhatian penting menurut Kemendikbud (2019), yaitu:

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Seluruh USBN akan diberikan kepada sekolah. Mengingat ujian dilaksanakan oleh sekolah, tanggung jawab untuk memonitor, mengevaluasi, dan menjamin kualitas tinggi ujian yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut jatuh pada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ujian diselenggarakan atas kebijaksanaan dan kebijaksanaan sekolah sendiri. USBN akan digantikan oleh penilaian yang diselenggarakan sekolah, yang dapat berupa tes tertulis atau bentuk penilaian yang lebih komprehensif seperti portofolio dan tugas (projek kelompok atau pekerjaan tertulis), sehingga sekolah dan guru dapat mengevaluasi hasil belajar secara lebih mandiri.

2. Ujian Nasional (UN)

Diharapkan peserta didik tidak merasakan tekanan mental setelah UN ditiadakan. Kompetensi minimal dan asesmen karakter akan menjadi pengganti UN. Penyederhanaan Pelaksanaan Pembelajaran Terencana Nadiem Makarim menegaskan, RPP hanya membutuhkan satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan para guru mendapatkan lebih banyak waktu untuk merancang dan menilai proses pembelajaran. Sebagai sarana untuk memberikan evaluasi terhadap aktivitas pembelajaran, terutama dalam konteks penanaman nilai karakter pada siswa, sekolah memanfaatkan survei karakter sebagai

indikator. Sehingga peserta didik pada akhirnya akan menginternalisasikan nilai-nilai karakter tersebut, yang secara otomatis mempengaruhi prestasi dan kualitas mereka.

3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran No. 14, Mendiknas mengeluarkan kebijakan baru penyusunan RPP tahun 2019 bertajuk “Penyederhanaan RPP”. RPP yang baru hanya memuat tiga komponen inti dalam RPP—tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi—berbeda dengan RPP sebelumnya yang memiliki lebih dari sepuluh komponen. Nadiem Makarim menegaskan, RPP hanya membutuhkan satu halaman. Dengan adanya penyederhanaan administrasi, diharapkan guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran.

4. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Sistem zonasi diperluas, tetapi kawasan 3T tidak termasuk. Sistem PPDB memberi lebih banyak peluang bagi peserta didik yang mengikuti jalur afirmasi dan prestasi. Persentase akhir dan zonasi wilayah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Akses yang tidak memihak dan sifat pengajaran harus digabungkan dengan dorongan oleh negara bagian terdekat, seperti penataan ulang instruktur ke sekolah dengan kekurangan guru.

d. Peran Guru Dalam Kurikulum Merdeka

Sudah sewajarnya, guru harus memainkan peran utama dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di setiap sekolah guna mencapai tujuan peningkatan motivasi belajar siswa. Guru dituntut mampu membawa perubahan dan mengimbangi perkembangan zaman, menekankan pendidikan karakter pancasila bagi peserta didik, selain

berhasil menciptakan suasana kelas dan menjunjung tinggi pancasila. Peran guru dalam mempraktekkan Kurikulum Merdeka (Sutikno, M. S., 2007 Manizar, E., 2015 dalam Javanisa et al., 2022), sebagai berikut:

- a. Guru harus mampu membawa perubahan yang positif, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta harus mampu menggerakkan kelompok seluruh rekan guru di sekolah dan wilayahnya.
 - b. Guru berperan dalam merancang dan mengontrol pembelajaran agar lebih menarik, sehingga siswa tidak bosan dan termotivasi untuk berbuat lebih baik.
 - c. Guru harus mampu memimpin muatan menuju peningkatan standar kepemimpinan sekolah.
 - d. Guru harus mampu menyiapkan ruang diskusi atau tempat pengelola kepentingan dan guru dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan mutu pembelajaran.
 - e. Kondisi belajar yang kondusif, tentram, dan nyaman harus diciptakan oleh guru sehingga dapat menggugah siswa untuk menjadi lebih kreatif, kritis, dan toleran.
 - f. Tugas guru adalah selalu mengembangkan potensi diri agar selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan memiliki tingkat pembaharuan yang tinggi.
 - g. Guru memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan menjadi contoh bagi semua siswa di sekolah. Ia juga dapat membantu siswa mengembangkan karakter dan membuat perubahan positif dalam kehidupan mereka sehingga generasi penerus akan berkualitas dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat.
- e. Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013
- Pada jenjang dasar ataupun menengah yang terdapat di Indonesia,

baru beberapa sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Namun, bagi sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya digunakan, yaitu kurikulum 2013. Dengan adanya kurikulum ini maka terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, berikut perbedaan tersebut:

- a. Tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan menjadi dasar pengembangan Kurikulum Merdeka yang mencakup pembentukan profil pelajar pancasila.
- b. Pada Kurikulum 2013, Jam Pelajaran (JP) ditetapkan mingguan, sedangkan pada Kurikulum Merdeka, JP ditetapkan setiap tahun.
- c. Kemampuan guru dan peserta didik yang terlibat dalam aktivitas belajar disesuaikan dengan kebutuhan, proses pembelajaran Kurikulum Mandiri dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Sedangkan fokus kurikulum 2013 adalah kegiatan pembelajaran di kelas.
- d. Dalam Kurikulum 2013, penilaian didasarkan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Sementara itu, Kurikulum Merdeka sangat mengutamakan profil pelajar Pancasila dan mengikuti kegiatan baik kurikuler maupun ekstrakurikuler.
- e. Kurikulum 2013 mencakup penilaian selama satu semester yang membekali peserta didik dengan hasil belajar untuk setiap mata pelajaran. Sedangkan, Kurikulum Merdeka dinilai berdasarkan Fase. Fase E untuk kelas X SMA dan Fase F untuk SMA kelas XI dan XII. Di kelas X SMA, mata pelajaran IPA dan IPS belum dipecah menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik.

f. Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka

Menurut Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (2022) terdapat beberapa tahapan implementasi Kurikulum Merdeka (Tabel 1) di satuan pendidikan

Tabel 1:
Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka

| No. | Aspek | Tahap Awal | Tahap Berkembang | Tahap Siap | Tahap Mahir |
|--------------------|--|---|--|--|--|
| Perencanaan | | | | | |
| 1. | Perancangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) | Membuat penyesuaian kecil terhadap contoh dokumen KOSP. | Mengembangkan KOSP berdasarkan contoh dengan memodifikasi bagian pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran sesuai kondisi satuan pendidikan, tanpa didasarkan pada refleksi terhadap hasil analisis karakteristik satuan pendidikannya | Mengembangkan KOSP berdasarkan contoh dengan memodifikasi pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran berdasarkan analisis dan refleksi terhadap kondisi satuan pendidikan dengan melibatkan perwakilan siswa, orangtua, atau masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan KOSP yang kontekstual dan sesuai aspirasi warga satuan pendidikan serta hasil analisis dan refleksi diri satuan pendidikan Menstrukturkan pembelajaran sesuai visi-misi dan konteks satuan pendidikan, dengan melibatkan perwakilan peserta didik, orangtua, dan masyarakat |
| 2. | Perancangan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Menggunakan contoh yang disediakan oleh Kemendikbud. | Melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan peserta didik | Melakukan perombakan berdasarkan kebutuhan peserta didik | <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan secara mandiri dengan merujuk pada Capaian Pembelajaran Koordinator kurikulum di satuan pendidikan memimpin proses perancangan, memonitor implementasi, dan memimpin proses pengembangan dan evaluasi Alur Tujuan Pembelajaran. |
| 3. | Perencanaan Pembelajaran dan Asesmen | Menggunakan contoh yang disediakan oleh Kemendikbud. | Melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan peserta didik. | Melakukan perombakan berdasarkan kebutuhan peserta didik. | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengembangan berdasarkan kebutuhan peserta didik. |

| No. | Aspek | Tahap Awal | Tahap Berkembang | Tahap Siap | Tahap Mahir |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| 4. | Penggunaan dan Pengembangan Perangkat Ajar | Menggunakan buku teks dan modul ajar sebagai sumber utama pengajaran. | Guru dapat memilih materi dari buku teks dan modul ajar, serta bahan ajar lainnya supaya sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik | <ul style="list-style-type: none"> Guru dapat mengkombinasikan dan menyesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Guru dapat memodifikasi beberapa bagian dari modul ajar yang disediakan. | <ul style="list-style-type: none"> Guru dapat mengkombinasikan dan menyesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Guru dapat mengembangkan modul ajar, serta berbagi kepada guru lain. Terdapat sesi pengembangan modul ajar secara kolaboratif |
| 5. | Perencanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) | Menggunakan modul proyek tanpa penyesuaian atau dengan penyesuaian yang sangat sedikit | Membuat penyesuaian sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik | Membuat penyesuaian sesuai konteks lokal, kebutuhan, serta minat peserta didik dengan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik | Mengembangkan ide dan modul proyek sesuai konteks lokal, kebutuhan, serta minat peserta didik dengan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik. |
| Pelaksanaan Pembelajaran | | | | | |
| 6. | Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) | <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan P5 dengan jumlah yang tidak sesuai dari yang dianjurkan. Proyek menghasilkan artifak, belum menitikberatkan pada penyelesaian masalah. | <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan P5 sesuai dengan yang dianjurkan. Proyek diarahkan oleh guru, kegiatan proyek mulai berorientasi pada pemahaman tentang penyelesaian masalah sesuai tema | <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan P5 sesuai dengan yang dianjurkan. Proyek difasilitasi oleh guru, kegiatan proyek mulai berorientasi pada pemahaman penyelesaian masalah sesuai tema | <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan P5 sesuai dengan yang dianjurkan. Proyek lebih banyak dilakukan berdasarkan inisiatif siswa dan difasilitasi guru/komunitas yang terlibat, kegiatan proyek berorientasi pada pemahaman penyelesaian masalah sesuai tema. |

| No. | Aspek | Tahap Awal | Tahap Berkembang | Tahap Siap | Tahap Mahir |
|-----|---|--|---|--|--|
| 7. | Penerapan Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik | Menggunakan metode pengajaran yang bervariasi namun masih didominasi oleh peran seperti instruktur yang mengarahkan kegiatan peserta didik sepanjang proses pembelajaran. | Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik, serta metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. | <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan. Memberikan kesempatan untuk siswa belajar mandiri. | <ul style="list-style-type: none"> Membedakan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Guru lebih terampil sebagai fasilitator, memberikan banyak kesempatan untuk siswa belajar mandiri. |
| 8. | Keterpaduan Penilaian dalam Pembelajaran. | <ul style="list-style-type: none"> Terdapat asesmen pada awal pembelajaran, hasilnya tidak digunakan untuk merancang pembelajaran. Dilakukan asesmen beberapa kali hanya untuk memberikan nilai, belum untuk merancang pembelajaran. Menggunakan asesmen yang disediakan dalam buku teks/modul ajar | <ul style="list-style-type: none"> Terdapat asesmen formatif pada awal pembelajaran, hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih. Ketika merancang asesmen, guru mulai memperhatikan kesesuaian antara asesmen dengan tujuan pembelajaran. | <ul style="list-style-type: none"> Guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran, hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan capaian mayoritas peserta didik di kelasnya Guru melakukan asesmen untuk mendapatkan umpan balik tentang kebutuhan belajar peserta didik dan menentukan tindak lanjutnya | <ul style="list-style-type: none"> Guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran, hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tahap capaian. Guru menyesuaikan pembelajaran sepanjang proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. |

| No. | Aspek | Tahap Awal | Tahap Berkembang | Tahap Siap | Tahap Mahir |
|-----|---|---|--|--|---|
| 9. | Pembelajaran Sesuai Tahap Belajar Peserta Didik (Pendidikan Dasar dan Menengah) | Berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan fase Capaian Pembelajaran mayoritas siswa di kelasnya. | Berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan fase capaian belajar mayoritas siswa di kelasnya dan dengan memberikan perhatian khusus terhadap sebagian siswa yang membutuhkan perlakuan (materi dan/atau metode belajar) yang berbeda. | <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan asesmen formatif siswa dibagi menjadi dua kelompok menurut capaian belajar. Sekolah menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelasnya. | <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan asesmen formatif, siswa dibagi menjadi dua kelompok menurut capaian belajar mereka. Ada program untuk siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelasnya dan untuk siswa yang membutuhkan pengayaan atau tantangan lebih. |
| 10. | Kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran | Belum berkolaborasi untuk keperluan pembelajaran intrakurikuler, namun sudah berkolaborasi untuk keperluan P5. | Berkolaborasi dalam proses perencanaan pembelajaran di awal atau akhir semester, dan berkolaborasi untuk keperluan P5. | Berkolaborasi dalam perencanaan pembelajaran di awal semester dan dalam proses pembelajaran, dan berkolaborasi untuk keperluan P5 serta terlibat dalam evaluasi kurikulum di satuan pendidikan. | <ul style="list-style-type: none"> Berkolaborasi untuk perencanaan pembelajaran di awal semester dan dalam proses pembelajaran, keperluan P5, dan terlibat dalam pengembangan KOSP. Memiliki kebijakan dan mekanisme yang mendorong kolaborasi guru. |
| 11. | Kolaborasi dengan orang tua/keluarga dalam pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> Guru memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik pada saat penerimaan rapor dan saat peserta didik mengalami masalah belajar. Komunikasi cenderung satu arah | <ul style="list-style-type: none"> Guru berkoordinasi dengan guru lain memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik pada saat penerimaan rapor dan secara berkala dalam proses belajar. Komunikasi cenderung satu arah. | <ul style="list-style-type: none"> Guru berkoordinasi dengan guru lain memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik pada saat penerimaan rapor dan secara berkala dalam proses belajar. Komunikasi cenderung dialog dua arah, pihak satuan pendidikan/guru dan orang tua/ wali, mencari kesepakatan bersama untuk mendukung proses belajar peserta didik. | <ul style="list-style-type: none"> Guru berkomunikasi dengan guru lain memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik pada saat penerimaan rapor dan secara berkala dalam proses belajar. Komunikasi berkala untuk orang tua memberikan umpan balik terhadap kurikulum dan pembelajaran. Orang tua berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran Komunikasi melibatkan tiga pihak, yaitu guru-siswa-orang tua. |

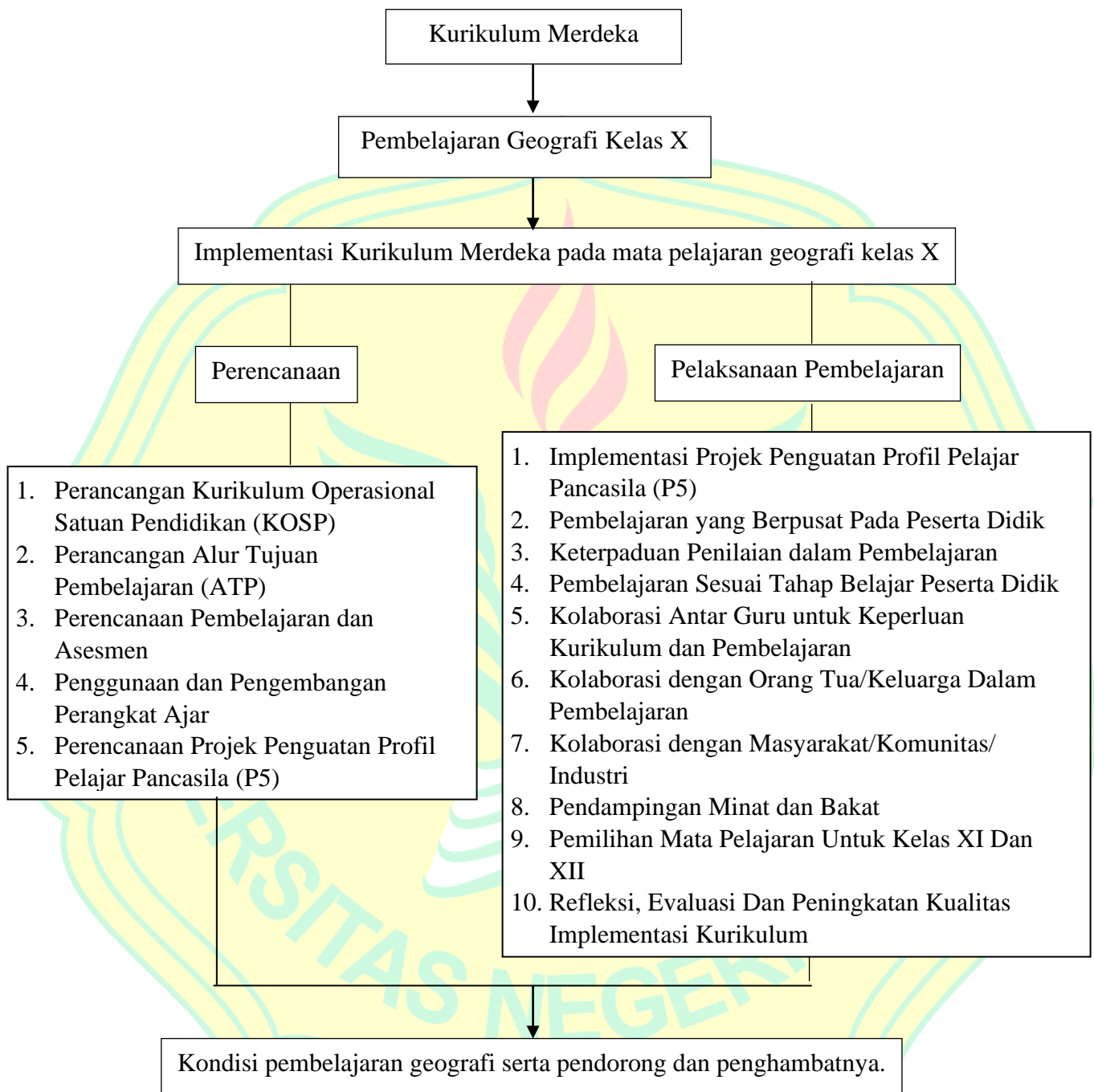
| No. | Aspek | Tahap Awal | Tahap Berkembang | Tahap Siap | Tahap Mahir |
|-----|---|--|---|---|--|
| 12. | Kolaborasi dengan masyarakat/komunitas/industri | Sudah merancang pelibatan masyarakat/komunitas/industri, namun belum terlaksana. | Melibatkan masyarakat/komunitas/industri hanya untuk mendukung kegiatan yang tidak berkelanjutan atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran intrakurikuler maupun P5. | Melibatkan masyarakat/komunitas/industri untuk mendukung pembelajaran intrakurikuler atau proyek penguatan profil pelajar, untuk kegiatan yang lebih panjang jangka waktunya | <ul style="list-style-type: none"> Melibatkan masyarakat/komunitas/industri secara berkelanjutan untuk mendukung pembelajaran intrakurikuler dan P5. Komunitas/industri yang dilibatkan lebih beragam sesuai tujuan pembelajaran. |
| 13. | Pendampingan minat dan bakat | Memberikan konsultasi kepada peserta didik yang mengajukan permintaan konsultasi. | Memberikan konsultasi bagi peserta didik secara berkelompok dengan mengalokasikan waktu, komunikasi bersumber dari guru | Memberikan konsultasi dan informasi tentang wawasan profesi secara individu atau berkelompok dengan mengalokasikan waktu khusus atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik | Memberikan konsultasi dan informasi tentang wawasan profesi secara individu atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan mengalokasikan waktu khusus dan mengadakan berbagai kegiatan untuk membuka wawasan tentang profesi. |
| 14. | Pemilihan mata pelajaran untuk Kelas XI dan XII | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan kesempatan bagi peserta didik menentukan mata pelajaran pilihan melalui pendataan. Tidak ada mekanisme penggantian mapel | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menentukan mata pelajaran pilihan berdasarkan ketersediaan SDM dan sarana prasarana. Ada mekanisme penggantian mapel di kelas XII | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menentukan mata pelajaran pilihan dan mengkonfirmasi kepada peserta didik. Ada mekanisme penggantian mapel di kelas XII | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menentukan mata pelajaran pilihan, mengkonfirmasi pilihan dan mengupayakan kolaborasi pembukaan kelas dengan satuan pendidikan lain. Memberikan opsi percobaan selama kurang lebih 2 minggu pada awal kelas XI, ada mekanisme pergantian mapel pilihan di kelas XII. |

| No. | Aspek | Tahap Awal | Tahap Berkembang | Tahap Siap | Tahap Mahir |
|-----|--|---|--|---|---|
| 15. | Refleksi, Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Implementasi Kurikulum | Cenderung satu arah dari pimpinan satuan pendidikan, dan belum berbasis data. | <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan sebagian guru Belum berbasis data, melainkan penilaian masing-masing guru berdasarkan pengalaman dan pandangan. Sebagian guru menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi tersebut | <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan sebagian guru. Hasil dilengkapi dengan data hasil belajar peserta didik, serta masukan orangtua/ wali. Rapor Pendidikan juga mulai digunakan data untuk refleksi dan evaluasi. Sebagian guru menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan mayoritas/semua guru. Hasil refleksi dilengkapi dengan data Rapor Pendidikan. Guru dalam tim kecil berkolaborasi melakukan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi. Satuan pendidikan memiliki kebijakan mengenai refleksi dan evaluasi kurikulum. |

Sumber: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2022.

F. Kerangka Berpikir

Merujuk pada Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, Nadiem Makarim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengusulkan perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Seperti yang terdapat pada Gambar 1, menurut Pusat Informasi Guru Kemdikbud (2022) Kurikulum Merdeka adalah jenis kurikulum yang dikembangkan sebagai kerangka kerja kurikulum yang lebih adaptif. Beberapa sekolah sudah menetapkan kebijakan kurikulum ini, terutama dalam pembelajaran geografi, namun beberapa sekolah belum menerapkannya secara maksimal, sesuai dengan beberapa penelitian terkait dengan hal ini. Sehingga, diperlukan penelitian untuk melihat seberapa jauh pengimplementasian Kurikulum Merdeka, terutama dalam hal ini pada pembelajaran geografi. Menurut Kemendikbud terdapat tahapan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Peserta didik dan guru selaku pelaku utama dalam proses pendidikan diharapkan dapat mewujudkan Kurikulum Merdeka sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta untuk menganalisis implementasi pembelajaran menggunakan Kurikulum Merdeka serta faktor penghambat dan pendorongnya di SMA Muhammadiyah 11 Jakarta.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)